

KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM ERA PEMERINTAHAN BARU INDONESIA

M. Ifan

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri, Jakarta Selatan,
Jakarta, Indonesia

Email: ifan.pascasarjanawiduri@gmail.com

Abstrak

Leadership is a never-ending topic in terms of organizations, institutions, companies and a nation. This article aims to analyse how Pancasila leadership is important in building and implementing the visions and missions of the new government in Indonesia. The purpose of writing this article is to find out how Pancasila leadership can be practiced in the new era of Indonesian government. The method used in writing is qualitative descriptive with a literature study approach, then analysing various literature and conducting a short study on relevant articles. The results suggest that a person who has Pancasila leadership will always apply a leadership style and art that displays the characteristics, characters, and values of Pancasila in every thought, idea, and action in leading the government. A new era government that has a Pancasila leadership perspective will be able to implement transparency and accountability consistently; strengthening the bureaucracy continuously; strengthening the legal and judicial system; increased supervision of government and public institutions; strengthening measurable human resources; and the involvement of public participation. Indonesia will become big and strong when its people are sovereign in the political field, independent in the economic field and have a personality in the cultural field as aspired by the father of the Indonesian nation.

Keywords: *Pancasila Leadership, Pancasila, Government*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim sekaligus kepulauan memiliki keunikan yang menonjol ditengah-tengah dunia. Pengelolaan sebuah bangsa dan negara pada akhirnya menuntut kehadiran kepemimpinan yang berdampak dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan. Sejak era kejayaan Kerajaan-kerajaan Nusantara, bangsa ini tidak luput dari peran pemimpin yang mengelola, membentuk dan mengembangkan menjadi lebih baik. Pada perkembangannya, sejak era kemerdekaan republik Indonesia telah memiliki beberapa fase sistem, antara lain: 1) sistem pemerintahan awal kemerdekaan tahun 1945; 2) Sistem Pemerintahan tahun 1949; 3) Sistem Pemerintahan UUDS; 4) Demokrasi Terpimpin; 5) Orde Baru; 6) Reformasi; 7) Sistem Pemerintahan Pasca

Amandemen UUD 1945 (Ahsanul Khuluqi & Muwahid, 2024). Setiap fase tersebut melahirkan catatan beragam prestasi dan kekurangannya dalam mengelola pemerintahan.

Pengelolaan pemerintahan tentu saja disesuaikan dengan arah Pembangunan yang disinergikan melalui visi dan misi para pemimpin. Pemimpin sebuah bangsa dan negara haruslah memiliki kemampuan transformasional dan melayani. Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemimpin dapat diperoleh apabila mereka mampu menggunakan kekuasaan dengan baik dan benar demi kemakmuran rakyat. Persoalan yang belakangan terjadi, banyak para pemimpin bangsa baik di eksekutif maupun legislatif memberikan dampak buruk melalui praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Hal tersebut memberikan catatan dan contoh yang buruk bagi generasi muda di Indonesia. Posisi pemerintahan negara sangat menentukan faktor yang memimpin perubahan, memimpin pergerakan kearah kemajuan berdasarkan pendekatan instrumen dan langkah kebijakan negara (Asshiddiqie, 2022).

Contoh-contoh pemimpin di dunia cenderung menjadi referensi bagi generasi muda di berbagai belahan dunia. Riset yang berkembang tentang kepemimpinan menunjukkan tren dan tantangan baru dengan pembahasan topik *leadership*, *Transformation leadership*, *leadership style* (Putra & Soeling, 2024). Topik-topik diatas masih sering terdengar dan diperbincangkan baik di dunia akademis maupun di dunia praktis. Salah satu yang menonjol selama hampir 2 dekade ini ialah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional menjadi sebuah gaya yang banyak menunjukkan keberhasilan perubahan dan dampak positif (Purwanto et al., 2023). Pada kenyataannya para pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional masih sangat sedikit. Melihat situasi saat ini, negara Indonesia yang memiliki penduduk sebanyak 277,5 juta jiwa dengan jumlah 16.766 pulau dan 1.340 suku memerlukan pemimpin yang mampu menyatukan serta menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi Masyarakatnya.

Indonesia sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki ideologi Pancasila. Pancasila merupakan hal primer yaitu sebagai dasar negara sekaligus ideologi dan spiritualitas bangsa (Manurung & Kanumoyoso, 2021). Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan yang khas bagi Indonesia yaitu kepemimpinan Pancasila yang bercirikan positif dari kristalisasi nilai-nilai luhur nenek moyang dan dasar nilai keagamaan yang kuat (Mahendra & Kartika, 2019). Pancasila tidak dapat tergantikan karena posisinya yang penting dan mengakar sebagai falsafah bangsa, sumber hukum yang terutama dan panduan nilai-nilai kehidupan di Indonesia. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Masyarakat Indonesia untuk memahami Pancasila secara utuh dan bukan sepenggal. Menjadi pekerjaan rumah para pemimpin bangsa untuk kembali memperkuat basis pengetahuan dan kemampuan

dalam bidang kepemimpinan Pancasila mulai dari bangku sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Oleh sebab itu, gaya kepemimpinan seseorang dalam memimpin negara sangat penting. Bangsa dan negara Indonesia yang besar bukan hanya berdasarkan wilayah akan tetapi sumber daya manusia memerlukan sosok yang mampu menerapkan kepemimpinan Pancasila di Indonesia. Kepemimpinan Pancasila menjadi tawaran yang hakiki bagi bangsa Indonesia dan para pemimpinnya. Menurut penulis, konsepsi kepemimpinan Pancasila dalam pemerintahan Indonesia dengan Masyarakat multikultural dan beranekaragam dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membawa dampak perubahan yang terukur. Atas dasar hal tersebut, penulis menganggap sangat penting dan terutama agar kepemimpinan Pancasila diterapkan pada era pemerintahan baru Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dianggap sebagai kumpulan tindakan membaca dan mencatat, pengolahan bahan penelitian, dan teknik pengumpulan data perpustakaan (Zed, 2004). Menganalisa berbagai literatur dan melakukan studi singkat pada artikel yang relevan, tulisan ini mendeskripsikan hasil studi kepustakaan dan sampai pada Kesimpulan bahwa kepemimpinan Pancasila menjadi alternatif ideal dalam pengelolaan pemerintahan baru di Indonesia. Hasil pemikiran dalam artikel ini dijabarkan secara teoritis, praktis sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam praktik dilapangan dan pengembangan pelayanan. Artikel ini terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan pentingnya kepemimpinan Pancasila, terakhir kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini, penulis membagi menjadi dua sub yakni kepemimpinan Pancasila dan pemerintahan era baru Indonesia yang kuat. Asa Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran pada Kabinet merah putih memerlukan strategi dan kreatifitas untuk mewujudkannya. Kepemimpinan Pancasila menjadi salah satu gaya maupun seni yang khas bagi Indonesia, dan pada pelaksanaannya dapat dilaksanakan bagi Masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai Pancasila yang melekat dalam setiap sendi kehidupannya. Hasilnya akan tampak ketika Indonesia dapat menerapkan kepemimpinan Pancasila akan memberikan dampak positif dalam setiap lini, profesi, dan bidang di berbagai wilayah Indonesia.

Kepemimpinan Pancasila

Kepemimpinan merupakan isu yang tidak pernah habis dalam pembahasannya. Pada setiap era peran kepemimpinan akan selalu menjadi indikator dalam keberhasilan sebuah organisasi atau institusi dan dalam pelaksanaan program atau layanan. Kepemimpinan, motivasi serta kepuasan kerja menjadi ukuran utama yang menentukan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja para bawahan atau tim yang bekerja sama (Yusrina Ayu Setiani et al., 2023). Pada praktiknya, kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah. Mulai dari mendengarkan, memahami, memberikan kepercayaan, motivasi, memberikan contoh, memberi apresiasi dan disiplin yang diperlukan hal-hal diatas harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Pada sisi lain komunikasi sering menjadi tantangan apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar (Abijaya et al., 2021).

Terkait kemampuan yang adaptif dan dinamis untuk mengukur dan mengevaluasi tim dan mengembangkan budaya organisasi yang mendukung serta penguatan kapasitas berkelanjutan serta umpan balik dari tim akan membantu memperkuat kepemimpinan dalam suatu organisasi (Sumarmi et al., 2024). Oleh sebab itu kepemimpinan menjadi hal krusial yang penting untuk memberikan dampak perubahan dalam berbagai hal.

Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam membangun bangsa Indonesia dengan beragam agenda nasional dan internasional paling tidak harus memiliki hal-hal diatas sebagai tolok ukur kepemimpinan. Keuntungan negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Pancasila sebagai *the way of life* memberikan arah bagi orang-orang Indonesia untuk membentuk dirinya sebagai seorang pemimpin. Makna utama yang terkandung pada kepemimpinan Pancasila dimana potensi dan setiap aksinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada setiap aksi dan langkah yang dilaksanakan maka individu tersebut akan memiliki jiwa Pancasila yang kemudian dapat diinternalisasi kedalam sendi kehidupannya. Nilai Pancasila dibutuhkan bagi Indonesia sebagai *integrative value, common denominator, national identity* dan *ideal value* (Narmoatmojo, 2010). Hal itu dapat menggambarkan bagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang kemudian melekat dan menjadi karakter bangsa yang hendak dikembangkan.

Pengembangan karakter tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan dan Pancasila menjadi arah yang jelas bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara. Tidak banyak pihak yang berfokus pada

isu Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diharapkan belum mampu menjangkau seluruh lapisan dan wilayah di Indonesia. Pembumian Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat menjadi sebuah gerakan para pemimpin Indonesia. Hal ini terbukti bahwa di kota Semarang dilaksanakan dengan baik, tampak dari skor 86,06% untuk pembumian Pancasila dan 83,63% untuk wawasan kebangsaan yang telah dilaksanakan (Kurniawan et al., 2023). Proses diatas perlu disinergikan ke berbagai wilayah Indonesia untuk mewujudkan kepemimpinan Pancasila di Indonesia.

Seorang pemimpin yang memiliki komitmen dan konsisten untuk menjalankan kepemimpinan Pancasila patut mendapatkan dukungan penuh bagi Masyarakat Indonesia. Kepemimpinan Pancasila mengandung karakteristik yang sudah melekat sejak awal keberadaan bangsa Indonesia. Karakteristik kepemimpinan Pancasila dilandasi melalui konsepsi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani yang kemudian mendorong seorang pemimpin yang berinisiatif, percaya diri, cermat, teliti, tepat waktu, memiliki sikap gotong royong, bertanggung jawab dan memiliki kasih sayang (Rai et al., 2022). Ciri-ciri tersebut harus menjadi bagian dari praktik seorang yang memiliki kepemimpinan Pancasila disamping ciri lainnya yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan analisa diatas kita dapat mencermati bahwa kepemimpinan Pancasila menjadi gambaran gaya dan seni memimpin yang memiliki ciri, karakter dan nilai Pancasila dalam setiap pandangan, pendapat dan tindakan seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki inisiatif, percaya diri, cermat dan teliti, memiliki tanggung jawab, mampu mendengarkan, memahami orang lain, memberikan kepercayaan, memotivasi dan memberikan contoh, tepat waktu, memiliki sikap gotong royong dan kasih sayang, serta mendahulukan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintahan Era Baru

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini mengarah kepada kualitas dan berdaya saing, atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance*. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam praktiknya meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan dan responsif yang menjadi pedoman pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya (Wardani et al., 2023). Pemeritahan Prabowo – Gibran menetapkan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” dengan delapan misi Asta Cita. Pendekatan yang dilakukan dengan merangkul seluruh pihak dan melanjutkan program

yang telah berjalan. Presiden Prabowo pada pidato pelantikannya mengaskan bahwa program kerja yang signifikan, terukur dan saling bersinergi antara Kementerian/ lembaga sangatlah penting (BPMI, 2024).

Adapun yang menjadi Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran terdiri dari : 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (Wisnubroto, 2024).

Program diatas sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045”. Terdapat enam bab pada RPJPN 2025-2045 Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045 (KEMENKO PEREKONOMIAN, 2023). Guna mewujudkan agenda besar tersebut, pemerintahan era baru memerlukan kesiapan dan adaptasi cepat serta kreatifitas yang fleksibel. Jika diperhatikan, arah yang dilakukan hampir sejalan dengan harapan Trisakti Bung Karno yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance* akan mendekati sempurna apabila dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki serta menjalankan kepemimpinan Pancasila. Seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan Pancasila akan mampu memastikan arah Politik Strategi Nasional. Adapun yang menjadi komponen utama dalam politik strategi nasional antara lain tujuan nasional, analisis situasi, keamanan

nasional, diplomasi hubungan luar negeri, kebijakan ekonomi, sumber daya manusia, kebijakan sosial, penelitian dan pengembangan, dan partisipasi Masyarakat (Wardani et al., 2023). Komponen diatas merupakan satu kesatuan yang penting untuk terhubung untuk melengkapi politik strategi nasional yang akan ditetapkan. Keputusan-keputusan penting ini memerlukan kemampuan kepemimpinan Pancasila.

Maka langkah yang dapat difokuskan antara lain; Pertama, Transparansi dan akuntabilitas yang perlu dibangun baik dari mulai pengelolaan keuangan negara hingga pengambilan setiap kebijakan serta keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini akan mengefisiensikan anggaran keuangan dan memprioritaskan kebutuhan publik yang paling dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Kedua, Penguatan birokrasi menjadi upaya yang wajib dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini akan memberikan persepsi positif dimata publik, dan memberikan efisiensi terhadap pengelolaan layanan yang tepat waktu dan komprehensif. Tahapan selanjutnya dapat berfokus pada pengembangan layanan yang lebih fleksibel dan cepat sebagaimana harapan Masyarakat tentang layanan birokrasi yang selama ini dialami dengan waktu yang sangat lama dan berputar-putar sehingga merugikan bagi Masyarakat. Sistem pelayanan yang transparansi akan memberikan kepercayaan publik dan lebih bersifat pemecah masalah sekaligus memfasilitasi Masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masalah yang dialami dalam hal keterjangkauan aksesibilitas pelayanan publik.

Ketiga, Sistem hukum dan peradilan diperkokoh agar pelaksanaan penegakan dan peradilan hukum bersifat adil, menjadikan alat yang tepat bagi negara untuk melindungi dan memperkuat ekosistem layanan hukum, sehingga Masyarakat, investor asing dan komunitas internasional merasa aman ketika berada di Indonesia. Pemerintah perlu pro aktif untuk melakukan penyuluhan hukum dan sistem peradilan, menyiapkan sistem layanan hukum yang fleksibel tidak rumit untuk semudah mungkin dipahami oleh Masyarakat. Para penegak hukum dapat menyiapkan sebuah layanan yang cepat tanggap, tanpa harus melakukan pelaporan di kantor layanan namun dapat dengan mudah dan cepat diakses secara digital. Mengingat perkembangan era teknologi digital saat ini, pemerintah harus mampu mengimbangi dengan pelayanan yang dapat terjangkau dan transformatif.

Keempat, Penguatan dan peningkatan pengawasan pada kinerja pemerintah dan institusi publik bukan saja mengenai akuntabilitas, transparansi, tetapi juga keberpihakan kepada kebutuhan Masyarakat bukan kepentingan pribadi atau golongan. Setiap suara Masyarakat dari tingkatan terkecil baik ditingkat Rukun Tetangga hingga provinsi terekapitulasi dan dapat terakomodasi dengan baik serta mudah diakses publik secara

transparan. Pada sisi lain, peran organisasi independen serta Masyarakat sipil menjadi tambahan yang dapat memperkuat pengawasan sehingga menciptakan situasi yang berimbang dalam pengelolaan pemerintahan.

Kelima, Penguatan Sumber Daya Manusia baik tenaga fungsional maupun non fungsional yang berkelanjutan, sehingga mampu melaksanakan undang-undang, kebijakan publik dan pelayanan yang tepat, cepat dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan diberbagai daerah, ketika peraturan atau kebijakan baru ditetapkan namun belum seluruhnya mendapatkan informasi yang utuh sehingga dalam waktu yang bersamaan pemberi layanan belum mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai peraturan maupun kebijakan yang baru tersebut. Sehingga layanan tidak maksimal di tengah-tengah Masyarakat.

Keenam, pelibatan partisipasi publik dalam setiap lini kesempatan, tidak hanya pada perhelatan pesta demokrasi, tetapi dalam pengambilan keputusan terkecil di Masyarakat hingga kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh komunitas Masyarakat. Pemerintah perlu mengubah orientasi proses menjadi orientasi output dan outcome serta adaptif, sehingga organisasi maupun Masyarakat sipil dapat turut serta mendukung program-program pemerintah dengan baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisa diatas, pemerintahan era baru harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai kepemimpinan Pancasila dan melaksanakan prinsi *good governance* dengan baik dan benar. Masyarakat saat ini sangat dekat dengan teknologi informasi dan media sosial. Setiap peristiwa dan informasi yang berkembang dapat dengan mudah diakses. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membangun pondasi persepsi publik dan layanan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keberadaan era baru menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan praktik nyata yang membumi bagi kesejahteraan dan keadilan Masyarakatnya.

PENUTUP

Pada kenyataannya, setiap pergantian pemerintahan baru selalu ada harapan baru bagi pemerintahan tersebut. Seorang yang memiliki kepemimpinan Pancasila akan selalu menerapkan gaya dan seni memimpin yang menampilkan ciri, karakter, dan nilai Pancasila dalam setiap pemikiran, gagasan, dan aksi dalam memimpin pemerintahan. Pemerintahan era baru yang memiliki perspektif kepemimpinan Pancasila akan mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara konsiten; penguatan birokrasi yang berkelanjutan;

memperkokoh sistem hukum dan peradilan; peningkatan pengawasan pemerintahan dan institusi publik; penguatan sumber daya manusia yang terukur; dan pelibatan partisipasi publik. Indonesia akan menjadi besar dan kuat ketika masyarakatnya berdaulat di bidang politik, berkari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya sebagaimana yang dicita-citakan bapak bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abijaya, S., Wildanu, E., & Jamaludin, A. (2021). PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 17–26. <https://doi.org/10.36787/jsi.v4i1.442>
- Ahsanul Khuluqi, M., & Muwahid, M. (2024). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(2), 167–180. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. PT. Kompas Media Nusantara.
- BPMI. (2024, October 24). *Presiden Prabowo Tegaskan Sinergi Program Kerja dan Hilirisasi Komoditas untuk Masa Depan Indonesia*. Bpkp.Go.Id. <https://www.bpkp.go.id/id/berita/lxOR/presiden-prabowo-tegaskan-sinergi-program-kerja-dan-hilirisasi-komoditas-untuk-masa-depan-Indonesia>
- KEMENKO PEREKONOMIAN. (2023, June 15). *Wujudkan Visi "Indonesia Emas 2045"; Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045>
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2019). Tri Hita Karana Sebagai Landasan Memperkuat Kepemimpinan Pancasila. *Seminar Nasional INOBALI 2019*, 222–228. <https://eproceeding.undwi.ac.id/index.php/inobali/article/view/166>
- Manurung, A. D. R., & Kanumoyoso, B. (2021). *Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi, dan Spiritualitas Bangsa* (2nd ed.). Media Maxima.
- Narmoatmojo, W. (2010). *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Ombak.
- Purwanto, E., Ate, J. P., & Ifa, M. (2023). The Importance of Transformational Leadership and Job Resources to Increase Lecturer Engagement: Learned from Indonesia Case. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2), e558. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.558>
- Putra, I. G. E. S., & Soeling, P. D. (2024). Tren Riset Tentang Kepemimpinan pada Jurnal Administrasi di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 5(3).
- Rai, I. B., Sila, I. M., & Dewi, I. A. C. (2022). Kepemimpinan Wirausaha Sinkretisme Kepemimpinan Pancasila dan Kepemimpinan Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
- Sumarmi, S., Tjahjono, H. K., Qamari, I. N., & Shaikh, M. (2024). Authentic Leadership and Team Performance: Exploring the Mediating Role of Dynamic Adaptive Capability. *Journal of Leadership in Organizations*, 6(2). <https://doi.org/10.22146/jlo.94502>

- Wardani, I. U., Fauzi, R., Zahari, I., Saryono, Tamrin, Mamonto, A. A. N., Dawi, M. N., & Kusumawaningsih, S. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Wisnubroto, K. (2024, November 5). *Tantangan Besar, Asta Cita, dan Keberlanjutan Pembangunan*. Indonesia.Go.Id.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8747/tantangan-besar-asta-cita-dan-keberlanjutan-pembangunan?lang=1>
- Yusrina Ayu Setiani, Rheza Ray Farandy, & Moch. Isa Anshori. (2023). Kepemimpinan Dan Gaya Manajemen : Studi Literature. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(3), 238–255.
<https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i3.804>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.